

7. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Sebagai dokumen perencanaan, maka Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2024, Renstra Tahun 2021 - 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, masalah yang dihadapi, usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat (Musrenbang), Pokok-pokok pikiran DPRD serta inovasi-inovasi OPD.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225)
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;

19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 107 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan; |
| BAB II | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar sampai dengan tahun 2023. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, review terhadap rancangan awal RKPD 2023, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat; |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran, menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar; |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan, menguraikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan program dan kegiatan, rekapitulasi dan penjelasan program dan kegiatan; |
| BAB V | Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut |

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai darisuatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk tahun 2022 evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dapat dirinci sebagai berikut :

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100	100	100,00
	Persentase tingkat hunian Rusunawa	95	95	100,00
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	17,2	20	116,28
	Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1,03	1,03	100,00
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	12,22	6,37	52,13

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	65,9 %	78,01 %	118,38
	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	63,1 %	75,66 %	119,90
Program Peningkatan PSU	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	62 %	74,16 %	119,61
	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	62 %	74 %	119,35
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,37	87,9	109,37

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 realisasi program / kegiatan telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Peraturan Walikota Blitar Nomor 107 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- Mekanisme kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja;
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk mencapai target program dan kegiatan melalui perjanjian kinerja serta menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi;
- Adanya dukungan organisasi terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

Dengan pencapaian realisasi target program dan kegiatan telah memberikan implikasi terhadap target capaian program Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tabel berikut :

- Indikator program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 berdasarkan Kepmendagri 050_3708 tahun 2020

- Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 berdasarkan Kepmendagri 050_5889 tahun 2021

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
sampai dengan Tahun 2023

Nama PD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	98,79	%	Periode Renstra Tahun 2016– 2021		96,37		97,43		101,1		96,99	13.380.257.160	97,43	98,62
		Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	89,89	%			68,62		76,83		111.96		73,94		76,83	85,47
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100	%		,	100	3.144.968.608	100	2.867.990.356,25	100	91,19	100	1.120.814.020	100	100
		Persentase tingkat hunian Rusunawa	95	%			95		95		100		95		95	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	90	%			70		70		100		75	22.500.015	80	66,67
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	4	Doku men			NA		NA		NA		1	22.500.015	1	25
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100	%			100	96.728.300	100	93.314.350	100	96,47	100	29.999.754	100	100
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	400	Orang			100	20.000.000	100	20.000.000	100	100	100	29.999.754	200	50
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/ kota	100	%			100	164.769.300	100	7.901.500	100	4,80	100	149.999.719	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	40	Unit Rumah			NA		NA		NA		10	149.999.719	10	25
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	B 84,45	Indeks			B 80,37	2.689.163.008	B 87,90	2.592.135.106,25	109,37	96,39	B 84,45	918.314.532	84,45	100
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4	Doku men			NA		NA		NA		1	918.314.532	1	25
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	82,73	%			17,2	5.306.705.100	20	5.279.736.600	116,28	99,49	20.11	2.453.950.012	40,11	48,48
		Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	4,12	%			1,03		1,03		100		1.03		2,06	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	95	%			NA		NA		NA		95 %	2.453.950.012	95 %	100
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	432	Unit Rumah			110	5.306.705.100	194	5.279.736.600	176,36	99,49	107	2.453.950.012	301	69,66
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	72	%			65,9	10.984.314.041	78,01	10.888.931.240	113,38	99,13	67,52	2.936.434.407	78,01	108,35
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	75,66	%			63,1		75,66		119,90		66,27		75,66	100
		Persentase rumah tidak layak huni/ rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	52,23	%			12,22		6,37		52,13		12,65		17,91	34,29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	32	Doku men			8	535.726.482	8	501.006.800	100	93,52	5	146.379.200	13	40,625
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	16	Doku men			4		4		100		1	100.000.000	5	31,25
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	8	Laporan			NA		NA		NA		2	10.550.400	2	25
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	8	Laporan			NA		NA		NA		2	35.828.800	2	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	140.663	m			120.663	10.448.587.559	183779	10.387.924.440	152,31	99,42	125.663	2.790.055.207	125.663	89,34
		Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	85.663	m			61.664		103547		167,92		67.664		67.664	78,99
		Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	910	Unit Rumah			140		58		41,43		192		163	17,91
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	910	Unit Rumah			140		58		41,43		95	1.765.750.000	163	17,91
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	16	Laporan			NA		NA		NA		2	14.902.730	2	12,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	68	Ha			NA		NA		NA		4.8	957.962.136	4.8	7.06
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4	Doku men			NA		NA		NA		1	51.440.341	1	25
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70	%			62	1.925.874.580	74,16	1.920.110.586	119,61	99,7	64	2.195.507.816	74,16	105,94
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70	%			62		74		119,35		64		74	105,71

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	24123	m			20123	1.925.874.580	24071	1.920.110.586	119,62	99,70	2000.74	2.195.507.816	24071	99,78
		Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	21475	m			13475		13698,90		101,66		256.3		13955.2	64,98
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16	Lokasi			NA		NA		NA		4	2.065.316.522	4	25
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	48	Laporan	-		12		12		100		12	130.191.294	24	50
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B 81,17	Indeks			B 80,37	4.371.002.974	B 87,90	4.162.219.496,9	109,37	95,22	B 80,57	4.810.035.905	B 87,90	109,37

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%			100	36.918.900	100	36.789.900	100	99,65	100	50.275.080	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Doku men			15	15.000.000	15	15.000.000	100	100	15	12.637.540	30	50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	Laporan			12	11.919.900	12	11.919.900	100	100	12	37.637.540	24	50
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%			100	3.307.750.724	100	3.051.719.526		92,26	100	3.359.911.660	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang/bulan			26	3.301.250.924	25	3.045.219.726	96,15	92,24	26	3.353.046.660	25,00	96,15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	28	Laporan			7	6.499.800	7	6.499.800	100	100	7	6.865.000	14	50
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%			100	97.593.200	100	90.392.700	100	92,62	100	100.436.453	100	100
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	Paket			NA		NA		NA		2	77.785.000	2	25
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Orang			NA		NA		NA		50	22.651.453	49	24.5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%			100	748.402.050	100	703.038.301,90	100	93,94	100	335.804.792	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket			NA		NA		NA		1	8.712.433	1	25
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket			NA		NA		NA		3	20.904.833	3	25
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	Paket			NA		NA		NA		4	13.304.880	4	25
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	245	Paket			NA		NA		NA		30	53.000.000	30	12.25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket			NA		NA		NA		1	21.684.946	1	25
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144	Doku men			NA		NA		NA		36	8.040.000	36	25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Laporan			NA		NA		NA		40	210.157.700	40	25
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	%			NA		NA		NA		100	20.551.249	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit			NA		NA		NA		2	20.551.249	2	18.18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%			100	49.530.000	100	41.645.811	100	84,08	100	662.729.871	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	Laporan			NA		NA		NA		24	32.879.871	24	25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	988	Laporan			NA		NA		NA		39	629.850.000	39	3.95
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%			100	130.808.100	100	130.808.100	100	98,37	100	143.841.800	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unit			8	84.302.600	8	82.373.106	100	97,71	10	104.893.000	18	45

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022						Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	162	Unit			4	3.579.100	4	3.579.100	100	100	77	36.488.800	81	50

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Dari table hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023 maupun Renstra dapat dikatakan berhasil walaupun belum optimal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Terkait kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel. 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

No.	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh			0,45 %	-	-	-	0,03 %	-	-	-	
2	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat			80 %	-	-	-	85,83 %	-	-	-	
3	Persentase Rumah Layak Huni			-	96,37 %	96,99 %	97,61 %	-	97,43 %	96,99 %	97,61 %	
4	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik			-	68,62 %	73,94 %	79,26 %	-	76,83 %	73,94 %	79,26 %	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tidak dapat terlepas permasalahan dan hambatan. Permasalahan dan hambatan terkait kinerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah :

- a. Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni
- b. Masih tingginya kawasan permukiman rawan kumuh
- c. Perubahan Tupoksi Dinas dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 50-5889 dimana kewenangan jalan lingkungan dan saluran drainase permukiman berpindah ke Dinas PUPR sehingga mempengaruhi pencapaian target indikator yang diampu dinas.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan di atas tentunya berdampak pada terhambatnya pencapaian visi misi kepala daerah. Oleh sebab itu perlu dicari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tepat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Selain permasalahan dan hambatan, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga dihadapkan pada tantangan dan peluang, diantaranya :

- a. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan rumah / perumahan semakin meningkat
- b. Kemungkinan munculnya kawasan permukiman kumuh baru sebagai imbas pertambahan penduduk

Dengan adanya masalah, hambatan, tantangan serta peluang yang dihadapi, telah memunculkan isu-isu penting yang strategis untuk segera ditindaklanjuti. Isu-isu strategis tersebut adalah belum tertatanya kawasan permukiman sehingga permukiman layak huni di Kota Blitar masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya rumah tidak layak huni serta Prasarana Sarana Utilitas (PSU) terutama jalan dan drainase lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman dalam kondisi kurang baik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Dalam tahap review terhadap rancangan awal RKPD, proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses review ini dilakukan mengingat rancangan awal RKPD perlu disesuaikan dan diubah sesuai dengan kondisi, data dan kebutuhan saat ini. Dari hasil review tersebut terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, diantaranya terdapat rumusan kegiatan dan indikator kegiatan yang sebelumnya ada dalam

rancangan awal RKPD karena adanya perubahan nomenklatur dan tupoksi Dinas dengan terbitnya Kepmendagri nomor 50-5889 tahun 2021 dan pemutakhirannya menyebabkan perubahan kewenangan penataan jalan dan saluran drainase lingkungan serta perubahan nomenklatur sub kegiatan seperti sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP, sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh menjadi Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh selain itu juga ketersediaan anggaran yang terbatas menyebabkan beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2024. Beberapa kegiatan juga berbeda dari rancangan awal RKPD terkait besaran nominal kegiatan, dan juga perubahan nomenklatur dan tupoksi Dinas dan juga ketersediaan anggaran menyebabkan perubahan yang sangat signifikan dalam analisis kebutuhan tahun 2024.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Blitar	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100 %	2.562.946.300	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Blitar	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100 %	794.458.679,00	Kaitan dengan ketersediaan anggaran maka sub kegiatan disesuaikan
			Persentase tingkat hunian Rusunawa	95 %				Persentase tingkat hunian Rusunawa	95 %		
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	80 %	275.832.500	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	80 %	61.974.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	102.120.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 dokumen	118.587.500	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 dokumen	61.974.800,00	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	55.125.000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100 %	203.320.971	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100 %	21.865.000,00	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kota Blitar	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	66.562.180	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	50 Orang	21.865.000,00	
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kota Blitar	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	40 Orang	46.878.000	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	0 Orang	0	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	2 dokumen	89.880.791	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	0 Dokumen	0	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	100 %	437.345.700	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	100 %	74.707.350,00	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Blitar	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 unit	181.658.200	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 unit	74.707.350,00	
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Kota Blitar	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit rumah	255.687.500	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Kota Blitar	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit rumah	0	

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Blitar	IKM Pengelolaan Rusunawa	B 84,25 Indeks	1.576.447.129	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Blitar	IKM Pengelolaan Rusunawa	B 84,25 Indeks	635.911.529,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Laporan	65.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0 Laporan	0	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	761.447.129	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	635.911.529,00	
	Pembangunan Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	1 Unit	750.000.000	Pembangunan Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	0 Unit	0	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Blitar	Prosentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi	100 %	70.000.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Blitar	Prosentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi	0 %	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	70.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0 Laporan	0	
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kota Blitar	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	20,11 %	2.718.495.400	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kota Blitar	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	20,11 %	2.053.225.100,00	
			Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1,03 %				Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1,03 %		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	95 %	2.718.495.400	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	95 %	2.053.225.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	105 unit	2.718.495.400	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	108 unit	2.053.225.100,00	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Blitar	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	69,15 %	12.904.963.500	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Blitar	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	69,15 %	1.875.359.500,00	
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	69,4 %				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	69,4 %		
			Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di	13,09 %				Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	13,09 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kawasan kumuh								
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	8 Doku	446.534.475	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	5 Doku	115.000.000	
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	4 Dokumen	362.536.800	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP)		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan hasil pemutakhiran Kepmengagri 50-5889
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	2 Laporan	35.493.000	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	2 Laporan	10.000.000	
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2 Laporan	48.504.675	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2 Laporan	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	130.663 m	12.458.429.025	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	130.663 m	1.760.359.500,	
			Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	73.663 m				Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	73.663 m		
			Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	524 unit				Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	318 unit		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	192 Unit	3.209.694.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit	426.305.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	126.393.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4 Laporan	259.046.900,	
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	17 Ha	8.533.359.052	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	4,5 Ha	1.050.007.600	Sub Kegiatan hasil pemutakhiran Kepmengagri 50-5889
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	138.982.973	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	25.000.000	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	66 %	1.948.082.300	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	66 %	795.195.000	
			Persentase drainase lingkungan	66 %				Persentase drainase lingkungan dalam	66 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dalam kondisi baik di kawasan perumahan					kondisi baik di kawasan perumahan			
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	m 221 23	1.948.082.300	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Panjang jalan dan drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	174 75 m	795.195.000,	
			Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	174 75 m				Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	221 23 m		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi	1.828.680.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi	790.425.000,	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 laporan	119.402.300	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 laporan	4.770.000	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A 84,53 In deks	5.158.160.074	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A 84,53 In deks	4.863.497.471	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	57.189.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	18.145.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	16.485.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	3.375.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	40.704.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	14.769.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.615.749.160	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.425.254.318	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	3.608.138.060	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	3.422.204.318	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	7.611.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	3.050.000,	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	102.806.750	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	108.546.800	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	75.625.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	69.755.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	27.181.750	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	38.791.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	365.957.184	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	322.423.800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.703.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.689.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.436.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	21.709.200,	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	15.965.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	13.289.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	61.890.299	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	49.025.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.853.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.582.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	8.442.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	210.165.585	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	199.923.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	10.500.000				5 Dokumen	10.205.800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	87 %	103.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	87 %	26.356.098	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	26.356.098,	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	691.081.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	790.913.055	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	42.335.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	51.119.055	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	247 Laporan	648.745.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	264 Laporan	739.794.000	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100 %	236.362.747	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100 %	171.858.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	115.382.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	141.773.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	40.137.680	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	30.085.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.746.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Blitar

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan saluran Jalan Pandan RW 6 Kel. Kauman	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	p = 1 m, l = 0,5 m, t = 0,5 m	Musrenbang RKPD
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		
	<i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>		Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pengaspalan Jalan dan Hotmix Perumahan Wisma Indah dengan ukuran kurang lebih 100 meter	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	450.45 m	Pokok Pikiran DPRD
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh		
	<i>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota</i>		<i>Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan</i>		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, JL. BARITO NO. 22 RT 02 RW 07 KEL. KAUMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Pokok Pikiran DPRD
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, JL. BENGAWAN SOLO RT 03 RW 03 KEL. PAKUNDEN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Pokok Pikiran DPRD
		Pembangunan Rumah Baru, JL. CISADANE GG. I NO. 57, RT 01 RW 07 BENDO	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Pokok Pikiran DPRD
		MOHON DIBANTU PEMBANGUNAN RUMAH UNTUK WARGA MISKIN JL. BARITO NO. 50 RT 03 RW 07 KEL. KAUMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Pokok Pikiran DPRD

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
		DI BUTUHKAN PERBAIKAN RUMAH UNTUK WARGA MISKIN JL. TIDAR NO. 172 RT 004 RW 004 KEL. KAUMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Pokok Pikiran DPRD
		PEMBANGUNAN RUMAH BARU , JL. ASAHAN GG.02 RT 002 RW 006	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Pokok Pikiran DPRD
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Jalan soka Rt.03 Rw. 01	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Pokok Pikiran DPRD
		Rehab Rumah Ibu Sriani Jl. Raden Patah no. 03 Rt.03 Rw.01 Ling.Santren Kel. Tanggung .(Rumah Perlu Perbaikan)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Pokok Pikiran DPRD
		Rehab rumah Ibu Sunarlin Jl, Sawunggaling III. No. 9 Rt.01 Rw.01. (Perlu Perbaikan Rumah Rumah karena Kurang layak Huni)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Pokok Pikiran DPRD
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni a.n. Bapak Hariyanto	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Pokok Pikiran DPRD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018, arah kebijakan pembangunan daerah dalam bidang perumahan rakyat di daerah adalah :

- (a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- (b) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan pernyataan kebijakan di atas maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dan sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- (1) penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- (2) penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targetting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- (3) fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- (4) kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017);
- (5) mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- (6) pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- (7) menyusun rencana penyediaan hunian layak atau Dokumen RP3KP;
- (8) mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan fasilitas umum dasar dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
- (9) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional dalam penerapan SPM perumahan rakyat dan mencapai tujuan bidang perumahan rakyat yaitu mempercepat pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar maka arah kebijakan pembangunan yang di perhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- (2) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

Dalam hal pencapaian pembangunan bidang perumahan dan pencapaian tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan PSU yang memadai, arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut:

- (1) infrastruktur dasar dan konektivitas; kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni;
- (2) pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); akses sanitasi layak pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); penyelenggaraan sinergi sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat;
- (3) terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga;
- (4) terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga; penyediaan rumah susun sewa untuk 550.000 rumah tangga; penyediaan KPR swadaya untuk 450.000 rumah tagga;
- (5) terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga; bantuan stimulant pembangunan baru rumah swadaya untuk 250.000 rumah tangga;
- (6) pembangunan rumah khusus di daerah perbatasan, pasca bencana dan pasca konflik untuk 50.000 rumah tangga;
- (7) mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak untuk 2,2 juta rumah tangga untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah;
- (8) peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
- (9) tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran dimaksud dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	2022		2023		2024	2025
		Target	Realisasi	Target	Proyeksi	Target	Target
Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,248	0,251	0,250	0,251	0,251	0,253
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	70,74 %	72,3 %	74,47 %	74,47 %	78,19 %	81,91 %
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A 84.51	A 85,88	A 84.51	A 86	A 84.53	A 84.55

Tabel 3.2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi Perhitungan	2022		2023		TARGET	
				Target	Realisasi	Target	Proyeksi	2024	2025
1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100%	96,37 %	97,43 %	96,99 %	97,43 %	97,61 %	98,23 %
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	68,62 %	76,83 %	73,94 %	97,43 %	79,26 %	84,57 %
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil Nilai Sakip Dinas Perumahan Rakyat pada tahun bersangkutan	A 84.51	A 85,88	A 84.51	A 86	A 84.53	A 84.55

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standa	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1.04.01. 2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1.04.01. 2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
1.04.01. 2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.04.01. 2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
1.04.01. 2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</i>	
1.04.01. 2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
1.04.01. 2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	
1.04.01. 2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.04.01. 2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1.04.01. 2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	
1.04.01. 2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1.04.01. 2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tingkat hunian Rusunawa Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	
1.04.02. 2.01	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate</i>	
1.04.02. 2.01. 0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Mendukung pencapaian SPM atau IKK
1.04.02. 2.02	<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi</i>	
1.04.02. 2.02. 001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian SPM atau IKK
1.04.02. 2.03	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota</i>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Mendukung pencapaian SPM atau IKK
1.04.02.2.05	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>	<i>IKM Pengelolaan Rusunawa</i>	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	
1.04.03.2.02	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun</i>	
1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Mendukung pencapaian IKK
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Mendukung pencapaian IKK
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Mendukung pencapaian IKK
1.04.03.2.03	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik</i>	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Mendukung pencapaian IKK Bansos
1.04.03.2.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Mendukung pencapaian IKK
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Mendukung pencapaian IKK
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Mendukung pencapaian IKK
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	
1.04.04.2.01	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan</i>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1.04.04. 2.01. 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Mendukung pencapaian IKK Bansos
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	
1.04.05. 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	
1.04.05. 2.01. 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Mendukung pencapaian IKK
1.04.05. 2.01. 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2024 adalah “Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur yang berkualitas serta tata ruang yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah”, dijabarkan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut.

1. Prioritas Daerah 1:
Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Prioritas Daerah 2:
Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital untuk Normalisasi Ekonomi
3. Prioritas Daerah 3:
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
4. Prioritas Daerah 4:
Penguatan Kualitas Pendidikan, Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Manusia
5. Prioritas Daerah 5:
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi
6. Prioritas Daerah 6:
Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar mendukung prioritas pembangunan 5 yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi.

Dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi monitoring dalam pencapaian target – target pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Blitar 2021 - 2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung
Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Program
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Blitar Membangun dan Kondusif	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, Pembangunan Rumah Swadaya, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Pencapaian SPM	Program Pengembangan Perumahan, Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan PSU

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2023

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun 2022
pada Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Memfasilitasi peningkatan RTLH menjadi RLH dan juga penyediaan rumah bagi MBR melalui pengajuan usulan pembangunan baru rumah swadaya baik melalui APBD maupun APBN, usulan pembangunan Rusunawa dan mendukung partisipasi masyarakat untuk berswadaya memiliki rumah	1. Melakukan pendatan dan update database rumah dan RTLH di Kota Blitar 2. secara rutin dan berkala menyediakan dan melaksanakan program Bansos Bidang Perumahan (Peningkatan kualitas rumah, Pembangunan Baru, Bantuan Jaringan instalasi listrik) melalui dana APBD. 3. Mengupayakan dan mengusulkan Bantuan sektor Perumahan (BSPS & Rumah Susun) ke Pusat melalui pendanaan APBN	- Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2.	Perlu adanya upaya pengurangan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa perbaikan insfratraktur permukiman, peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta kolaborasi program kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat, provinsi dan daerah serta swadaya masyarakat dan swasta.	Dilaksanakan kegiatan dalam rangka penanganan kawasan kumuh melalui : - o Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh - o Pemeliharaan saran prasarana di kawasan permukiman kumuh - o Penyadaran public pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh melalui sosialisasi kepada masyarakat - o Mengusulkan penanganan kawasan kumuh secara terpadu melalui DAK Integrasi	Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, - Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh, - Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP, - Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh, - Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

Sumber : LKJIP DPRKP Kota Blitar 2022, diolah

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Untuk mencapai visi misi kepala daerah dan tujuan serta sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka perlu dijabarkan melalui program dan kegiatan teknis yang berisi indikator kinerja, target serta pendanaan. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM serta pendayagunaan potensi yang ada di daerah.

Pada tahun 2024 jumlah program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sejumlah 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Lokasi program dan kegiatan adalah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan di Kota Blitar. Untuk dana/pagu indikatif bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah.

Untuk rumusan program dan kegiatan tahun 2024 secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Blitar
Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Blitar

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				10.381.735.750,00				24.461.611.084,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.381.735.750,00				24.461.611.084,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				10.381.735.750,00				24.461.611.084,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	Kota Blitar	100 %	794.458.679,00			100 %	1.150.943.042,00
		Persentase tingkat hunian Rusunawa		95 %				95 %	
1.04.02.2.01	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate</i>		80 %	61.974.800			85 %	40.516.875,00
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi		1 Dok	61.974.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dok	40.516.875,00
1.04.02.2.02	<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau</i>	<i>Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi</i>		100 %	21.865.000			100 %	82.093.125,00

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>								
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		50 orang	21.865.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100 orang	82.093.125
1.04.02.2.03	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase penyediaan jenis layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota</i>		100 %	74.707.350			100 %	190.741.200,00
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		6 Unit rumah	74.707.350	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Unit rumah	190.741.200,00
1.04.02.2.05	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>	<i>IKM Pengelolaan Rusunawa</i>		^B _{84,25} Indeks	635.911.529			^B _{84,35} Indeks	837.591.842,00
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1 Dokumen	635.911.529	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	837.591.842,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		69,4 %	1.875.359.500			69,4 %	12.889.726.014,0
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		69,15 %				69,15 %	
		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh		13,09 %				13,09 %	
1.04.03.2.02	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Jumlah laporan dan data base permukiman yang tersusun</i>		5 Dokumen	115.000.000			8 Dokumen	468.861.314,0

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		2 laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 laporan	50.855.314,00
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi		1 Doku men	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Hasil Pemutakhiran Kepmendagri 050-5889	4 Doku men	380.663.700,0
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		2 Kelom pok	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 laporan	37.342.300,0
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni dikawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya		318 unit	1.760.359.500			717 unit	12.420.864.700,0
		Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik		73.663 m				79.663 m	
		Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik		130.663 m				135.663 m	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		20 Unit Rumah	426.305.000	Insentif Fiskal		192 Unit Rumah	3.209.694.000,
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		4 Lapo ran	259.046.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Lapo ran	139.032.300
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		1 Doku men	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Doku men	152.880.270,0
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		4.5 Ha	1.050.007.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Hasil Pemutakhiran Kepmendagri 050-5889	17 Ha	8.919.258.130,00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN	Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat		1.03 %	2.053.225.100,			1.03 %	2.854.420.170

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berpenghasilan Rendah (MBR)							
		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh		20.11 %				20.11 %	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan		95 %	2.053.225.100			95 %	2.854.420.170
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		108 Unit Rumah	2.053.225.100	Insentif Fiskal		105 Unit Rumah	2.854.420.170
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		66 %	795.195.000			68 %	2.054.486.465,
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		66 %				68 %	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik		17475 m	795.195.000			19475 m	2.054.486.465,
		Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik		22123 m				23123 m	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		4 Lokasi	790.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Lokasi	1.929.114.000,00
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan		4 Laporan	4.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Laporan	125.372.465,00

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan							
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)		B 84,25 Indeks	4.863.497.471,			B 84,35 Indeks	5.512.035.393,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	18.145.000			100 %	60.045.750,0
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15 Doku men	3.375.500,0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		15 Doku men	17.306.250,00
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	14.769.500,0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	42.739.500,0
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	3.425.254.318,00			100 %	3.796.299.302,
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/ bulan	3.422.204.318,	Dana Alokasi Umum		26 Orang/ bulan	3.716.382.202,0
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD		7 Laporan	3.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7 Laporan	79.917.00,0
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	108.546.800			100 %	115.805.600

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	69.755.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Paket	83.187.500,0
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	38.791.800,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		50 Orang	32.618.100
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	322.423.800,00			100 %	520.927.651,0
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	8.689.100,0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	11.239.100
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	21.709.200,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Paket	130.771.251,00
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	13.289.300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Paket	16.346.100,00
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30 Paket	49.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		30 Paket	88.445.400,0
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	19.582.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	19.995.500,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	199.923.000,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		40 Laporan	243.130.300
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5 Dokumen	10.205.800,0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Dokumen	11.000.000,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		87 %	26.356.098,			88 %	50.000.000,00
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	26.356.098,0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Unit	50.000.000,00

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	790.913.055,00			100 %	825.893.360,00
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	51.119.055,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		24 Laporan	44.452.700,0
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		264 Laporan	739.794.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		264 Laporan	781.440.660,0
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	171.858.400,0			100 %	143.063.730,0
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	141.773.400,0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Unit	126.920.530,00
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	30.085.000,0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Unit	16.143.200,0
JUMLAH					10.381.735.750,00				24.461.611.084,00

Dengan focus pada :

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diantaranya :

1. Masih terdapatnya infrastruktur permukiman yang kondisinya kurang baik sehingga rawan menimbulkan permukiman kumuh terutama di kawasan padat penduduk, hal ini dikarenakan perkembangan persoalan penataan kawasan permukiman sehingga diterbitkan Keputusan Walikota Blitar nomor 188/338/HK/410.010.2/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Blitar.
2. Kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Dalam menghadapi permasalahan di atas, terdapat beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Perlu adanya upaya pengurangan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa perbaikan infrastruktur permukiman, peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta kolaborasi program kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat, provinsi dan daerah serta swadaya masyarakat dan swasta.
2. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi MBR melalui pengajuan usulan pembangunan baru rumah swadaya baik melalui APBD maupun APBN, usulan pembangunan Rusunawa dan mendukung partisipasi masyarakat untuk berswadaya memiliki rumah.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024.

Rencana Kerja tahun 2024 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

a) Catatan Penting

Penyusunan Renja tahun 2024 dibayangi oleh terbitnya Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana kewenangan penataan jalan lingkungan dan saluran drainase dipindahkan ke Dinas PUPR sehingga mempengaruhi pencapaian target indikator utama.

Dalam Rencana Kerja tahun 2024 terdapat beberapa sub kegiatan tercantum dalam Renstra Dinas tetapi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan juga karena adanya pemutakhiran Kepmendagri 050-5889 sehingga ada 2 sub kegiatan yang mengalami perubahan nomenklatur yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP, sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh menjadi Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh.

b) Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaannya,
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

c) Rencana Tindak Lanjut

Dalam pencapaian kinerja maka akan diupayakan hal – hal sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah maupun lembaga lainnya untuk pencapaian target indikator kinerja;
2. Mengupayakan sumber anggaran di luar APBD Kota Blitar seperti DAK, BSPS, CSR, Swadaya Masyarakat dan lain-lain.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui

perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.